

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas dalam agenda pembangunan nasional Indonesia, terutama sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kebijakan tersebut memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk mengatur serta mengelola potensi lokalnya secara mandiri. Desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya (Adisasmita, 2006). Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT, 2023), penguatan kapasitas desa menjadi kunci dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi lokal.

Dalam konteks tersebut, sektor pariwisata menjadi salah satu instrumen strategis dalam pembangunan desa. Pariwisata dinilai mampu memberikan dampak ekonomi yang luas (multiplier effect), seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, pengembangan usaha mikro, serta penguatan identitas budaya lokal. Data

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menunjukkan bahwa sektor pariwisata berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menjadi salah satu sektor prioritas dalam pembangunan ekonomi berbasis masyarakat (Kemenparekraf, 2023). Oleh karena itu, pengembangan desa wisata menjadi salah satu kebijakan yang terus didorong pemerintah sebagai bentuk integrasi antara pembangunan ekonomi, pelestarian budaya, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pengembangan desa wisata di Indonesia diarahkan tidak hanya pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga pada penguatan partisipasi masyarakat sebagai pelaku utama. Konsep desa wisata menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam penyediaan atraksi wisata, pengelolaan homestay, pengembangan produk kerajinan, serta penyediaan jasa pendukung lainnya. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai aktor sentral dalam proses pembangunan (Chambers, 1995). Partisipasi masyarakat diyakini mampu meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*) serta keberlanjutan program pembangunan desa wisata.

Sejalan dengan paradigma tersebut, *Community Based Tourism* (CBT) berkembang sebagai model pengelolaan pariwisata yang berbasis komunitas. CBT menempatkan masyarakat lokal sebagai pemegang kendali utama dalam perencanaan, pengambilan keputusan, serta distribusi manfaat ekonomi dari kegiatan pariwisata (Goodwin & Santilli, 2009). Menurut

(Suansri, 2003), CBT bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal melalui penguatan kapasitas, pelestarian budaya, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, pembangunan pariwisata tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada pemberdayaan sosial dan pelestarian nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, penerapan CBT dalam pengembangan desa wisata dipandang sebagai strategi yang relevan dalam mendukung pembangunan desa yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan di Indonesia.

Secara teoritis, pembangunan desa yang berbasis partisipasi masyarakat tidak dapat dilepaskan dari konsep pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar mampu mengelola sumber daya yang dimiliki serta menentukan arah pembangunan secara mandiri. Pemberdayaan merupakan proses transformasi yang dilakukan secara terencana untuk meningkatkan kapasitas individu maupun kelompok sehingga memiliki daya (*power*) dalam menentukan pilihan dan tindakan yang berkaitan dengan kehidupannya. Pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, kelembagaan, dan kesadaran kritis masyarakat terhadap potensi serta permasalahan yang dihadapi (Dwidjowijoto, 2007),.

Dwidjowijoto menjelaskan bahwa proses pemberdayaan masyarakat berlangsung melalui tiga tahapan yang saling berkaitan, yaitu penyadaran (*awareness*), pengkapasitasan (*capacity building*), dan pendayagunaan (*empowerment utilization*). Tahapan pertama adalah penyadaran, yaitu proses membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap potensi, peluang, dan tantangan yang dimiliki. Pada tahap ini, masyarakat didorong untuk memahami bahwa mereka memiliki sumber daya yang dapat dikembangkan serta memiliki hak dan kemampuan untuk terlibat dalam proses pembangunan. Penyadaran menjadi fondasi penting karena tanpa adanya kesadaran, partisipasi masyarakat cenderung bersifat pasif dan bergantung pada pihak luar. (Dwidjowijoto, 2007),

Tahapan kedua adalah pengkapasitasan, yaitu proses peningkatan kemampuan masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, serta penguatan kelembagaan. Pada tahap ini, masyarakat dibekali dengan keterampilan teknis, manajerial, maupun sosial agar mampu mengelola potensi yang dimiliki secara efektif (Soetomo, 2011). Pengkapasitasan juga mencakup penguatan organisasi lokal seperti kelompok sadar wisata (Pokdarwis), koperasi, atau kelompok usaha masyarakat. Menurut Ife (2013), peningkatan kapasitas masyarakat merupakan inti dari pembangunan berbasis komunitas karena tanpa kemampuan yang memadai, masyarakat akan sulit bersaing dan mempertahankan keberlanjutan program pembangunan.

Tahapan ketiga adalah pendayagunaan, yaitu pemanfaatan kemampuan dan potensi yang telah dibangun untuk kegiatan produktif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada tahap ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima program, tetapi telah mampu menjalankan aktivitas ekonomi, sosial, maupun kelembagaan secara mandiri. Pendayagunaan menjadi indikator keberhasilan pemberdayaan karena menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki daya dan kemandirian dalam mengelola pembangunan di lingkungannya.

Konsep pemberdayaan masyarakat tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan pendekatan *Community Based Tourism* (CBT). CBT merupakan model pengembangan pariwisata yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan distribusi manfaat pariwisata (Suansri, 2003). Dalam perspektif CBT, masyarakat tidak hanya menjadi objek wisata, tetapi menjadi subjek yang memiliki kontrol terhadap pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya wisata. Goodwin dan (Santilli, 2009) menegaskan bahwa keberhasilan CBT sangat bergantung pada tingkat partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mengelola kegiatan pariwisata.

Dengan demikian, CBT pada dasarnya merupakan implementasi praktis dari konsep pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata. Tahapan penyadaran dalam pemberdayaan sejalan dengan upaya membangun kesadaran wisata masyarakat; pengkapasitasan sejalan dengan

pelatihan dan penguatan kelembagaan pengelola wisata; serta pendayagunaan tercermin dalam kemampuan masyarakat memanfaatkan potensi wisata untuk meningkatkan kesejahteraan (Suansri, 2003).. Oleh karena itu, penerapan CBT dalam pengembangan desa wisata tidak dapat dilepaskan dari proses pemberdayaan masyarakat yang sistematis dan berkelanjutan. Kerangka teoritis ini menjadi landasan penting dalam menganalisis bagaimana proses pemberdayaan masyarakat berlangsung dalam pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah Rendeng Malo.

Pada tingkat regional, Kabupaten Kabupaten Bojonegoro dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi ekonomi berbasis sumber daya lokal, baik di sektor pertanian, industri kreatif, maupun pariwisata. Dalam kerangka pembangunan daerah, pemerintah Kabupaten Bojonegoro mendorong pengembangan potensi desa sebagai bagian dari strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis kearifan lokal. Salah satu desa yang memiliki potensi unggulan adalah Desa Rendeng yang terletak di Kecamatan Malo.

Desa Rendeng telah lama dikenal sebagai sentra kerajinan gerabah tradisional. Aktivitas produksi gerabah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat dan menjadi bagian dari identitas sosial serta budaya desa. Produk gerabah yang dihasilkan tidak hanya memiliki nilai fungsional sebagai peralatan rumah tangga, tetapi juga memiliki nilai seni dan ekonomi yang cukup tinggi. Potensi ini menjadi modal sosial dan ekonomi

yang dapat dikembangkan lebih lanjut melalui pendekatan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya lokal.

Melihat potensi tersebut, Desa Rendeng mulai diarahkan untuk berkembang sebagai desa wisata edukasi gerabah. Konsep desa wisata edukasi tidak hanya menawarkan produk jadi kepada wisatawan, tetapi juga memberikan pengalaman belajar secara langsung mengenai proses pembuatan gerabah, mulai dari pengolahan tanah liat hingga tahap pembakaran dan finishing. Model wisata edukasi ini diharapkan mampu meningkatkan daya tarik wisata sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, pendekatan ini juga berperan dalam melestarikan keterampilan tradisional agar tetap diwariskan kepada generasi berikutnya. Dalam proses pengembangan desa wisata edukasi gerabah, peran pemerintah desa menjadi sangat penting sebagai fasilitator, regulator, sekaligus motivator. Pemerintah Desa memiliki kewenangan dalam perencanaan pembangunan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan pengalokasian anggaran desa untuk mendukung sarana dan prasarana wisata. Selain itu, pembentukan dan penguatan kelembagaan lokal seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) menjadi strategi penting dalam memastikan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata.

Pokdarwis berperan sebagai penggerak utama kegiatan wisata di tingkat desa. Kelompok ini bertanggung jawab dalam pengelolaan atraksi wisata, promosi, pelayanan wisatawan, serta koordinasi dengan pemerintah desa dan pihak eksternal. Keberadaan Pokdarwis menjadi wujud nyata

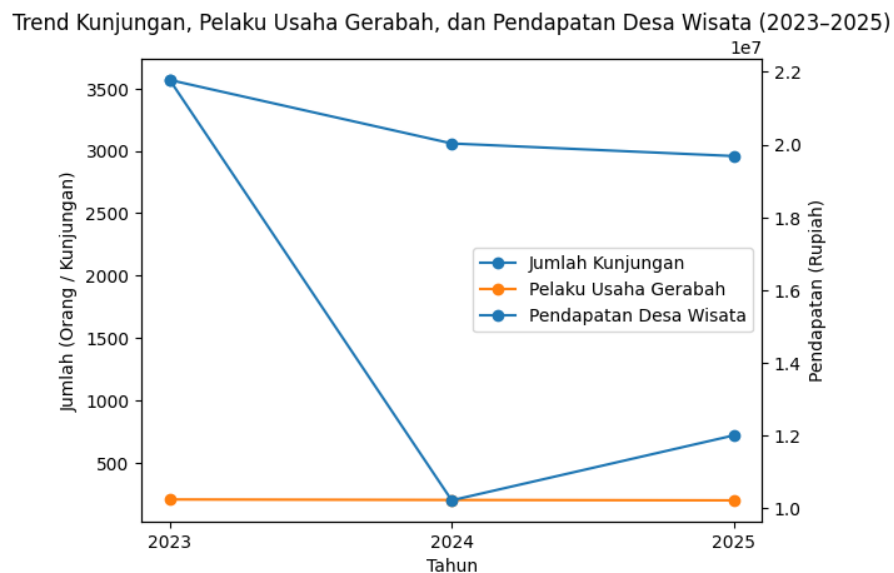
penerapan prinsip partisipatif dalam pengembangan desa wisata, karena melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan kegiatan wisata. Sinergi antara pemerintah desa dan Pokdarwis menjadi faktor kunci dalam menentukan keberlanjutan dan efektivitas pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah Rendeng Malo.

Namun demikian, dalam praktiknya pengembangan desa wisata berbasis komunitas tidak selalu berjalan optimal. Tantangan seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, promosi yang belum maksimal, serta koordinasi antar-stakeholder menjadi isu yang perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, analisis terhadap proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah Rendeng Malo menjadi penting untuk melihat sejauh mana tahapan penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayagunaan telah dilaksanakan secara efektif.

Pengembangan desa wisata sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat kemandirian desa. Dalam pendekatan *Community Based Tourism* (CBT), keberhasilan pengembangan desa wisata dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat, jumlah kunjungan wisatawan, serta manfaat ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat lokal (Suansri, 2003; Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007). Oleh karena itu, data mengenai perkembangan kunjungan wisata, jumlah pelaku usaha, dan pendapatan desa wisata menjadi indikator penting untuk melihat sejauh mana proses pemberdayaan masyarakat telah berjalan secara optimal.

Berdasarkan data perkembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah Rendeng Malo dalam tiga tahun terakhir, terlihat adanya fluktuasi jumlah kunjungan wisatawan, jumlah pelaku usaha gerabah, serta pendapatan desa wisata yang menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata belum sepenuhnya stabil. Data tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 1. Kunjungan Pelaku Usaha Gerabah, dan Pendapatan Desa Wisata (2023-2025)



Sumber : Data Desa Rendeng, diolah peneliti, 2026

Berdasarkan grafik perkembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah Rendeng Malo tahun 2023–2025, terlihat adanya kecenderungan penurunan jumlah kunjungan wisata serta jumlah pelaku usaha gerabah. Jumlah kunjungan wisata menurun dari 3.568 pengunjung pada tahun 2023 menjadi 3.059 pada tahun 2024 dan kembali menurun menjadi 2.958 pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan bahwa daya tarik dan pengelolaan desa wisata masih memerlukan penguatan agar mampu mempertahankan minat wisatawan.

Selain itu, jumlah pelaku usaha gerabah juga mengalami penurunan dari 205 pelaku usaha pada tahun 2023 menjadi 201 pada tahun 2024 dan 198 pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan usaha gerabah sebagai potensi utama desa wisata.

Dari sisi ekonomi, pendapatan desa wisata menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2023 pendapatan desa wisata mencapai Rp21.778.000, kemudian menurun drastis pada tahun 2024 menjadi Rp10.214.000, dan sedikit meningkat pada tahun 2025 menjadi Rp12.000.000. Data ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi dari pengembangan desa wisata belum stabil, sehingga diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat yang lebih optimal melalui pendekatan *Community Based Tourism*.

Meskipun Desa Rendeng memiliki potensi besar sebagai desa wisata edukasi gerabah, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai permasalahan empiris yang menghambat optimalisasi pengembangan wisata berbasis masyarakat. Permasalahan tersebut berkaitan erat dengan aspek kesadaran, kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, serta dampak ekonomi yang dihasilkan. Pertama, tingkat kesadaran wisata masyarakat belum sepenuhnya optimal. Tidak seluruh masyarakat memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya pengembangan desa wisata sebagai peluang peningkatan kesejahteraan. Sebagian masyarakat masih memandang kegiatan wisata sebagai aktivitas tambahan, bukan sebagai sektor strategis yang perlu

didukung secara kolektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyadaran (awareness) sebagai tahapan awal pemberdayaan belum berjalan secara merata dan berkelanjutan. Kedua, keterampilan sumber daya manusia (SDM) di bidang pariwisata masih terbatas. Pengelolaan wisata edukasi membutuhkan kemampuan dalam pelayanan wisatawan, komunikasi, pemasaran digital, manajemen keuangan, hingga pengemasan atraksi wisata. Namun, sebagian besar pelaku gerabah masih berfokus pada produksi tradisional dan belum memiliki kompetensi tambahan dalam aspek hospitality maupun manajemen wisata. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengkapasitasan (capacity building) belum sepenuhnya maksimal. Ketiga, pengemasan paket wisata edukasi gerabah belum dilakukan secara profesional dan terstruktur. Konsep wisata edukasi seharusnya menawarkan pengalaman yang sistematis, mulai dari penyambutan, penjelasan proses pembuatan gerabah, praktik langsung, hingga evaluasi atau refleksi pembelajaran. Namun dalam praktiknya, kegiatan edukasi masih bersifat spontan dan belum dikemas dalam bentuk paket wisata yang memiliki standar pelayanan yang jelas. Akibatnya, daya tarik dan nilai jual wisata edukasi belum berkembang secara optimal. Keempat, manajemen kelembagaan desa wisata belum sepenuhnya solid. Koordinasi antara pemerintah desa, Pokdarwis, dan pelaku usaha gerabah masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal pembagian tugas, perencanaan program, dan pengelolaan keuangan. Kelembagaan yang belum tertata dengan baik dapat mempengaruhi keberlanjutan program serta menimbulkan potensi konflik internal. Padahal,

dalam pendekatan pembangunan berbasis komunitas, kelembagaan yang kuat menjadi salah satu indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Kelima, dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat belum signifikan dan merata. Meskipun sudah ada kunjungan wisata, peningkatan pendapatan masyarakat belum menunjukkan perubahan yang substansial. Hal ini disebabkan oleh jumlah kunjungan yang belum stabil, sistem pemasaran yang terbatas, serta belum optimalnya diversifikasi produk wisata. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka motivasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengembangan desa wisata dapat menurun.

Berdasarkan berbagai permasalahan empiris tersebut, dapat dipahami bahwa proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah Rendeng Malo masih menghadapi berbagai tantangan pada setiap tahapan, mulai dari penyadaran, pengkapasitasan, hingga pendayagunaan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk mengetahui sejauh mana proses pemberdayaan telah berjalan serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

Secara konseptual, pendekatan *Community Based Tourism* (CBT) menekankan prinsip partisipasi aktif masyarakat, pemerataan manfaat ekonomi, penguatan kelembagaan lokal, serta keberlanjutan sosial dan budaya (Suansri, 2003; Goodwin & Santilli, 2009). Dalam perspektif teoritis, CBT dipandang sebagai model ideal dalam pengembangan desa wisata karena menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek wisata. Melalui pendekatan ini, masyarakat diharapkan terlibat dalam setiap

tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, sehingga tercipta kemandirian dan peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Namun demikian, secara empiris implementasi CBT di Desa Rendeng Malo belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip ideal tersebut. Partisipasi masyarakat belum merata, kapasitas sumber daya manusia masih terbatas, pengemasan wisata edukasi belum terstruktur secara profesional, serta dampak ekonomi yang dihasilkan belum signifikan dan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep normatif CBT yang bersifat ideal dengan realitas implementasi di tingkat lokal.

Kesenjangan tersebut menjadi penting untuk dikaji secara lebih mendalam, khususnya dalam perspektif pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007), pemberdayaan berlangsung melalui tahapan penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayagunaan. Oleh karena itu, analisis terhadap pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah Rendeng Malo perlu difokuskan pada bagaimana proses pemberdayaan berbasis CBT tersebut berlangsung: apakah tahapan penyadaran telah membangun kesadaran kolektif masyarakat; apakah pengkapasitasan telah meningkatkan kemampuan pengelolaan wisata; dan apakah pendayagunaan telah menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi urgensif untuk dilakukan guna mengidentifikasi sejauh mana penerapan prinsip *Community Based Tourism* dalam pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah Rendeng Malo mampu mendorong proses pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian pemberdayaan masyarakat dan pariwisata berbasis komunitas, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah desa, Pokdarwis, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mengoptimalkan pengelolaan desa wisata secara partisipatif dan berkelanjutan.

B. PERUMUSAN MASALAH

Permasalahan pertama yang muncul terkait pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Edukasi Gerabah Rendeng Malo adalah belum optimalnya tahap penyadaran. Sebagian masyarakat masih memandang aktivitas pembuatan gerabah sebatas pekerjaan rutin, bukan sebagai potensi wisata yang dapat dikembangkan. Kesadaran mengenai manfaat ekonomi jangka panjang dari wisata edukasi dan pentingnya partisipasi aktif dalam pengelolaan desa wisata masih perlu ditingkatkan. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyadaran belum berjalan sepenuhnya. Permasalahan berikutnya terjadi pada tahap pengkapasitasan. Banyak masyarakat yang belum memiliki keterampilan pendukung pariwisata seperti kemampuan menjadi pemandu wisata, pengemasan produk edukasi, pelayanan wisatawan, serta pemasaran digital. Selain itu, pelatihan yang diberikan selama ini masih terbatas baik dari segi jumlah maupun ragamnya.

Kondisi ini membuat masyarakat belum siap secara kompetensi untuk mengelola desa wisata secara profesional sesuai prinsip CBT.

Pada tahap pendayagunaan, tantangan terjadi ketika kemampuan masyarakat yang sudah terbentuk belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagian pengrajin belum mampu mengintegrasikan proses pembuatan gerabah dengan paket wisata edukasi secara menarik bagi wisatawan. Kelembagaan pokdarwis juga belum sepenuhnya solid, sehingga pemanfaatan potensi lokal belum terkoordinasi dengan baik. Akibatnya, kegiatan wisata berjalan tidak konsisten dan belum mampu menarik wisatawan dalam jumlah signifikan.

Selain tantangan internal, terdapat pula permasalahan struktural seperti koordinasi dengan pemerintah desa, dukungan fasilitas wisata, dan akses pemasaran yang masih terbatas. Belum adanya sistem manajemen wisata yang tertata membuat inovasi wisata sulit berkembang. Minimnya dukungan infrastruktur seperti papan informasi, area demonstrasi gerabah, dan fasilitas pendukung lainnya juga menghambat implementasi CBT secara maksimal.

Secara keseluruhan, masalah utama terletak pada belum terintegrasinya tiga tahap pemberdayaan masyarakat menurut Wrihatnolo & Dwidjowijoto (penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayagunaan) dalam pengembangan desa wisata. Proses pemberdayaan masih berjalan sebagian dan belum menyeluruh, sehingga dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat belum terasa secara signifikan. Kondisi inilah yang menjadi dasar pentingnya penelitian untuk mengidentifikasi akar masalah, mengevaluasi implementasi

CBT, serta merumuskan langkah strategis dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat Desa Rendeng Malo. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pemberdayaan masyarakat berbasis *Community Based Tourism* (CBT) Pada desa Wisata Edukasi gerabah Rendeng Malo?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Peneliti

Menurut (Sugiyono, 2018) tujuan penelitian yaitu agar data dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan. Sedangkan hasil dari penelitian akan memperoleh suatu pengetahuan baru sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Untuk menganalisis proses pemberdayaan masyarakat berbasis *Community Based Tourism* (CBT) dalam pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah Rendeng Malo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro.

2. Kegunaan Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2018) manfaat penelitian adalah jawaban atas tujuan penelitian yang dibahas dalam hasil penelitian, guna mendapatkan sistem pengetahuan dalam memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah yang sudah dirumuskan didalam topik penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan harapan menghasilkan informasi yang rinci, akurat dan aktual yang dapat memberikan manfaat dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pariwisata berbasis komunitas (*Community Based Tourism*). Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap penguatan konsep tahapan pemberdayaan masyarakat (penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayagunaan) dalam konteks pembangunan desa wisata. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

b. Secara praktis

1) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mahasiswa mengenai konsep pemberdayaan masyarakat dan *Community Based Tourism* dalam konteks pembangunan desa. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik serta bahan kajian bagi mahasiswa yang tertarik pada bidang Administrasi Publik, khususnya terkait pembangunan partisipatif dan pengembangan desa wisata.

2) Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi ilmiah dan bahan kajian akademik dalam pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya yang berkaitan dengan

pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Selain itu, hasil penelitian ini dapat mendukung penguatan tri dharma perguruan tinggi, terutama dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

D.SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam penulisan penelitian ini, diperlukan sistematika penulisan agar dapat memudahkan pembaca dalam menguraikan objek penelitian dan juga memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan yang terdapat dalam penulisan ini, maka susunan sistematika penulisan penelitian ini adalah :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang didalamnya menguraikan isi berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua merupakan bab yang menguraikan landasan teori dan konsep yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, Community Based Tourism (CBT), serta pengembangan desa wisata. Selain itu, bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu yang relevan serta kerangka berpikir penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab tiga, merupakan bab yang membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga uraian didalamnya meliputi, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, manajemen data, serta teknik analisis data.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab empat, merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan dimana didalamnya menguraikan mengenai proses pemberdayaan masyarakat berbasis CBT dalam pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah Rendeng Malo. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan temuan penelitian dengan teori yang digunakan

5. BAB V PENUTUP

Bab lima, merupakan bab penutup dimana bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran yang dianggap perlu dalam penelitian yang dilakukan. Dengan adanya bab penutup, pembaca dapat memperoleh gambaran ringkas tentang hasil penelitian dan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian tersebut.

